

Pemberdayaan Kelompok Agroindustri Dalam Upaya Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur

Sri Eka Astutiningsih¹

Citra Mulya Sari²

^{1,2} IAIN Tulungagung, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstract

The majority of the Indonesian population, especially in East Java live in rural areas, and most are farmers. Then to the economic development of rural farmers as a unity between the agricultural sector and small industrial group aimed at empowering agro-industries. Agro-industry is the best answer, since it relates to the rear (backward linkage) and the linkage to the front (forward linkage) long. Empowerment of agro-industry in itself is not easy, a lot of problems to deal with, among others: (1) the ability of the technology used is not optimal, (2) the quality of human resources (HR), (3) coordination and synchronization institutional program, (4) creation of business climate conducive. The government has implemented fiscal policy to encourage the use of small industrial products in order to export, encouraging the growth of business-incubation as well as the development of "ancillary industries " through tax relief, monetary policy to support the financing of capital investments and working capital through credit schemes specifically tailor our flexible, development financial institutions, administrative and real for the simplification of licensing procedures and investment, import-export procedures, joint development with major industry in the country and abroad, the implementation of the Small Business Act, especially in managing the trade patterns and the pattern of payments through the backup market. If these four indicators are met and determined government policy will spur the growth of the local economy, so it could eventually resolve the problems in the village.

Keywords : *agro-industry and economic growth.*

Pendahuluan

Keberadaan kelompok di masyarakat sebagai bentuk organisasi yang didirikan oleh orang perseorangan atau kelompok, pembentukan kelompok di masyarakat dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip yang memiliki kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu.

Sebagian penduduk Indonesia, khususnya Jawa Timur berdomisili di pedesaan, dan sebagian besar adalah petani. Maka untuk itu pembangunan ekonomi petani pedesaan sebagai satu kesatuan antara pembangunan sektor pertanian dan industri kecil diarahkan pada upaya pemberdayaan kelompok agroindustri. Dengan adanya kelompok agroindustri maka pengembangan agroindustri ini sekaligus akan dapat menyediakan lapangan kerja bagi penduduk pedesaan sejalan dengan berkembangnya kegiatan sektor pertanian (*on farm*) dan di luar pertanian (*off farm*) melalui proses pengolahan dan kegiatan jasa perdagangan komoditas primer, angkatan kerja di sektor pertanian masih dominan $\pm 46,1\%$. Berkembangnya kegiatan tersebut akan meningkatkan nilai tambah di pedesaan, perluasan diversifikasi produksi pedesaan, pendapatan petani dan mempercepat akumulasi kapital pedesaan.

Dalam perkembangannya, industri kecil pedesaan dalam hal ini agroindustri dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi karena dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar (padat karya) (Hubeis, 1997).

Selanjutnya Saragih, mengatakan perlu dikembangkan strategi dan kebijaksanaan yang menempatkan agroindustri (dan agrobisnis) sebagai salah satu sektor unggulan, apabila sasaran pembangunan adalah sebagian besar penduduk berpendapatan rendah atau miskin yang terutama terkonsentrasi di sektor pertanian dan pedesaan.

Pertumbuhan ekonomi, di satu pihak, dan pertumbuhan *employment* (kesempatan kerja) di sektor pertanian dan pedesaan yang menyerap sebagian besar angkatan kerja di lain pihak, bisa saja sebagai dua sisi mata uang yang sama. Perbaikan kesejahteraan itu sendiri sebagai upaya untuk menekan kesenjangan merupakan sumber pertumbuhan yang cukup potensial. Itulah hakikat dari *demand approach*.

Melihat perjalanan industri kecil sebagai salah satu “bagian” yang digeluti masyarakat kecil, yang mempunyai peranan dalam pembangunan masyarakat, yang mempunyai prospek untuk dikembangkan, maka sangat perlu untuk mendapat sentuhan pembangunan lebih baik lagi agar menjadikan mereka lebih memiliki daya untuk mewujudkan tujuannya. Sebab pada kenyataannya sektor yang sangat dekat dengan masyarakat kecil ini masih terlalu jauh dari “profesionalisme” dan kontinuitas usahanya masih tersendat-sendat dan sangat disayangkan kalau sampai putus di tengah jalan.

Menyadari realitas yang ada pada petani pemberdayaan terhadap agroindustri sangat dibutuhkan. Dasar proses pemberdayaan adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta kemauan mereka untuk menjadi lebih baik. Proses pemberdayaan masyarakat ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Lebih lanjut, harapan dari proses pemberdayaan ini adalah terwujudnya masyarakat yang bermartabat. Dan dalam proses pembangunan ini harus dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, dengan memegang teguh aturan-aturan mengenai apa yang menjadi hak dan mana yang bukan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, termasuk menumbuh kembangkan perilaku.

Menurut Saragih, perekonomian Indonesia tidak bisa berbasis teknologi tinggi, tetapi industrialisasi dengan landasan sektor pertanian. Agroindustri merupakan jawaban paling tepat, karena mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) yang panjang. Keterkaitan ke belakang ke sektor pertanian akan memacu pertumbuhan perekonomian pedesaan, sehingga lambat laun bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di desa. Secara tidak langsung hal itu akan menggairahkan lagi kegiatan masyarakat desa, sehingga mengurangi arus urbanisasi.

Tinjauan Literatur

Pengertian Agroindustri

Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Secara eksplisit pengertian Agroindustri pertama kali diungkapkan oleh Austin (1981) yaitu perusahaan yang memproses bahan nabati (yang berasal dari tanaman) atau hewani (yang dihasilkan oleh hewan). Proses yang digunakan mencakup pengubahan dan pengawetan melalui perlakuan fisik atau kimiawi, penyimpanan, pengemasan dan distribusi. Produk Agroindustri ini dapat merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan baku industri lainnya.

Agroindustri merupakan bagian dari kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen. Agroindustri merupakan kegiatan yang saling berhubungan (interlasi) produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran dan distribusi produk pertanian. Dari pandangan para pakar sosial ekonomi, agroindustri (pengolahan hasil pertanian) merupakan bagian dari lima subsistem agribisnis yang disepakati, yaitu subsistem penyediaan sarana produksi dan peralatan, usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran, sarana dan pembinaan.

Adanya kelompok agroindustri merupakan solusi penting untuk menjembatani keinginan konsumen dan karakteristik produk pertanian yang variatif dan tidak bisa disimpan. Menurut UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha industri kecil memberikan dasar hukum bagi pemberian fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, dan pengadaan barang dan jasa untuk usaha industri kecil.

Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan (Arsyad, 1992 : 191). Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitatif change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita. Produk domestik bruto (PDB) adalah total nilai pasar (*total market value*) dari barang-barang akhir dan jasa-jasa (*final goods and services*) yang dihasilkan di dalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.

Teori Schumpeter

Salah satu pendapat Schumpeter yang penting adalah landasan teori pembangunannya yaitu keyakinannya bahwa system kapitalisme merupakan system yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun demikian, Schumpeter meramalkan secara pesimis bahwa dalam jangka panjang system kapitalisme akan mengalami kemandegan.

Proses perkembangan ekonomi menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para innovator atau entrepreneur (wiraswasta). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur. Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter membedakan pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Menurut Schumpeter pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan “teknologi” produksi itu sendiri.

Teori Harrod-Domar

Harrod-Domar mengemukakan syarat-syarat yang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dengan mantap atau *steady growth* dalam jangka panjang di dalam pertumbuhan mantap semua variabel seperti output, tabungan, investasi, dan kemajuan teknologi, masing-masing tumbuh secara konstant atau pada laju yang lurus secara eksponensial.

$$\Delta Y / Y = s / k$$

Dimana:

$\Delta Y / Y$ = tingkat pertumbuhan output

Persamaan tersebut merupakan persamaan Harrod-Domar yang disederhanakan bahwa tingkat pertumbuhan output ($\Delta Y / Y$) ditentukan secara bersama oleh rasio tabungan (s) dan rasio modal output (COR = K). Makin tinggi tabungan yang diinvestasikan maka makin tinggi pula output yang dihasilkan. Sedangkan hubungan antara COR dengan tingkat pertumbuhan adalah negative (makin besar COR, makin rendah tingkat pertumbuhan output).

Teori Adam Smith

Adam Smith menyatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis ada tiga aspek, yaitu (*Arsyad, 1992 : 42*):

1. Pertumbuhan Output Total

Sumber alam yang tersedia (masih diwujudkan sebagai faktor produksi tanah). Menurut Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maya bagi pertumbuhan perekonomian, maksudnya jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan output.

2. Stok barang modal

Stok modal menurut Smith merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output, sehingga jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok pengaruh stok modal terhadap tingkat output total bisa secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung, maksudnya adalah karena pertambahan modal akan langsung meningkatkan output, sedangkan pengaruh tidak langsung maksudnya adalah peningkatan produktifitas perkapita yang dimungkinkan karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang semakin tinggi.

3. Pertumbuhan Penduduk.

Menurut Smith yang sangat menentukan jumlah penduduk pada suatu masa tertentu adalah tingkat upah pada saat itu. Jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari pada tingkat upah subsisten (tingkat upah yang hanya cukup untuk hidup pas-pasan), maka jumlah penduduk akan meningkat. Smith juga menyatakan bahwa tingkat upah ditentukan oleh stok kapital dan tingkat pertumbuhan output. Oleh karena itu jumlah penduduk akan meningkat atau menurun tergantung pada stok modal dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu.

Faktor-Faktor Yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi

1. Faktor Sumber Daya Alam.

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud dinataranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

2. Faktor Sumber Daya Manusia.

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4. Faktor Budaya.

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

5. Sumber Daya Modal.

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011:7) penelitian kualitatif disebut sebagai penelitian dengan metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Terdapat dua jenis dari metode penelitian kualitatif, yakni penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapang (*field research*) (Zed, 2004:1). Jenis penelitian ini

menggunakan jenis penelitian kepustakaan, maka metodologi penelitian ini menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Studi kepustakaan dilakukan dengan penelaahan gagasan para pakar, konsepsi yang telah ada, aturan (rule) yang mengikat objek ilmu beserta profesinya (Djalaludin, 2012: 51).

Zed (2004: 4-5) menyebutkan empat ciri bagi riset kepustakaan. Pertama, peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat siap pakai dan sudah tersedia di perpustakaan. Ketiga, umumnya data pustakan merupakan sumber sekunder, bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. Keempat, kondisi data pustaka bersifat statik, tetap, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Hasil dan Pembahasan

1. Kemampuan teknologi belum optimal

Di bidang teknologi, masih dihadapkan pada keterbatasan untuk menyediakan teknologi yang tepat guna dan memberikan nilai tambah yang signifikan dan siap digunakan (*instant*). Hal demikian menyebabkan masih tingginya ketergantungan teknologi luar negeri untuk pengolahan produk pertanian. Hal ini berdampak pada masih rendahnya produktivitas, efisiensi dan pendapatan relatif pelaku agrobisnis dan agroindustri. (Kurniawaty, 2002)

Tantangan pertanian di era industrialisasi dan perdagangan bebas menuntut penguatan pertanian melalui model-model baru. Model pembangunan pertanian dengan paradigma modernisasi yang secara praksis terlihat melalui revolusi hijau ternyata hanya mampu mendongkrak tingkat produksi. Sementara kesenjangan sosial ekonomi di pedesaan masih tampak besar. Paradigma pertanian industrial yang dikembangkan dengan secara jeli mempertimbangkan aspek budaya dan struktur sosial dapat menjadi alternatif bagi model pertanian masa depan.

Di balik tantangan yang dihadapi untuk pengembangan agroindustri dalam kurun waktu 2009-2013, terdapat berbagai peluang yang sangat menjanjikan untuk pengembangan agroindustri. Pertama, memanfaatkan dampak positif penurunan nilai tukar rupiah; kedua, keinginan dunia usaha yang semakin meningkat untuk menanamkan modal di bidang agrobisnis dan agroindustri. Ketiga, kurang berpengaruhnya permintaan dunia produk pertanian dan terjadinya krisis ekonomi. Keempat, meningkatnya semangat ilmuwan untuk menemukan teknologi tepat guna dan kelima, terjadinya demokratisasi, redistribusi aset, pemihakan kepada pelaku pertanian yang semakin tinggi, yang didukung semangat, integritas, dan daya tahan pelaku pertanian yang sangat tinggi.

2. Kualitas sumberdaya manusia (SDM)

Sebagian besar SDM yang terlibat dalam agro Industri adalah orang-orang yang berasal dari lapisan bawah masyarakat di Indonesia Kelompok masyarakat yang termarginalisasi ini mencari tempat bergantung pada usaha kecil dengan penghasilan yang pas-pasan. SDM ini memiliki ketrampilan yang rendah, skill yang rendah dan tingkat pendidikan yang rendah. Untuk itu mereka sangat mengharapkan pembinaan untuk mengubah kemampuan sehingga SDM agro industri ini lebih berkualitas dan memiliki kompetensi yang tinggi. Sehingga mampu menjalankan usaha lebih baik dan meningkatkan penghasilan, menjadikan mereka lebih bermartabat sebagai pekerja dan sebagai manusia.

Keterbatasan informasi pasar akan berakibat pada banyak hal yaitu tidak diserapnya produk oleh pasar dengan optimal karena pengusaha tidak bisa: menggambarkan ukuran, struktur dan perilaku konsumen sasaran, rencana posisi produk di pasar, *market share* dan estimasi penjualan untuk beberapa tahun ke depan. Kebanyakan pengusaha kecil beroperasi dengan berorientasi pada produk sehingga mengabaikan aspek pasar.

Upaya untuk melakukan inovasi produk, memodifikasi dan memperbaharui teknologi produksi (peralatan dan infrastruktur) peningkatan volume produksi, pembangunan SDM tentu membutuhkan tambahan modal. Keterbatasan modal yang dimiliki tentu mengurangi peluang untuk menjadikan mereka lebih berdaya hal ini disebabkan rendahnya aksesibilitas agro industri terhadap sumber pendanaan formal serta tingginya bunga bank bagi pengadaan fasilitas dan peralatan usaha.

3. Koordinasi dan sinkronisasi program kelembagaan

Kelompok agroindustri belum memiliki bentuk organisasi yang mampu menghadapi perubahan dengan cepat, karena struktur organisasi internalnya masih sederhana (mendekati organisasi lini) dan tidak memiliki job description yang jelas. Seringkali tugas dan wewenang personilnya saling overlap misalnya manajer umum (yang juga owner) merangkap jabatan sebagai controller dan kadang-kadang sebagai pelaksana produksi. Bagian pemasaran, produksi atau keuangan diserahkan pada anggota keluarga yang lain sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya internal audit karena saling maklum (keluarga sendiri). Ini menjebak industri kecil masuk ke dalam manajemen yang tidak profesional. Untuk memperbaiki kondisi tersebut perlu peningkatan kemampuan personal (komunikasi dan kerjasama tim) serta kemampuan manajerial (kepemimpinan dan manajemen yang bersifat fungsional bukan lini) serta perbaikan iklim dan budaya kerja. Sehingga dalam hal ini sangat perlu dibentuk program kemitraan atau organisasi yang benar-benar terstruktur dengan tepat.

Kemitraan disini merupakan jalinan kerjasama dari dua atau lebih pelaku usaha yang saling menguntungkan. Kebijakan yang memberi peluang berkembangnya kelembagaan semacam ini telah ada, yaitu dengan diluncurkannya Gerakan Kemitraan Nasional oleh Bapak Presiden Suharto. UU No 9 Tahun 1995 menyebutkan bahwa kemitraan kerjasama usaha kecil dan usaha menengah atau besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau besar. Kemitraan didasarkan pada prinsip saling memperkuat.

4. Penciptaan iklim usaha yang kondusif

Diperlukan suatu kebijakan yang mendorong iklim usaha yang kondusif bagi agroindustri. Kebijakan tersebut berkaitan dengan penyederhanaan prosedur perijinan melalui pendelegasian wewenang ke daerah (otonomi daerah), fasilitas khusus bagi agroindustri pedesaan yang berkaitan dengan permodalan (kredit lunak), penyebaran teknologi tepat guna/teknologi sederhana ke seluruh pedesaan, menyediakan informasi yang akurat, jelas dan berkesinambungan mengenai peluang usaha, pemasaran dan teknologi.

Pengaturan tata niaga sebaiknya memihak pada petani/masyarakat pedesaan, bukan mengarah pada konglomerasi atau pemusatan ekonomi. Pengalaman terhadap pengaturan tataniaga cengkeh, jeruk dapat menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, juga kacaunya tataniaga cabe, bawang putih dan bawang merah. Intervensi pemerintah yang memihak petani/masyarakat perlu dilakukan, antara lain dengan

penyediaan informasi yang akurat. Maka untuk itu harus ada strategi pengembangan “*market intelligence*”, sistem promosi dan penyebar-luasan informasi pasar yang akurat.

Pemerintah telah menerapkan kebijakan fiskal, moneter, administratif dan riil berikut yang ditujukan untuk memberikan pelayanan terhadap industri kecil (Bappenas, 1995). Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong pemakaian produk industri kecil dalam rangka ekspor dan subkontraktng, mendorong pertumbuhan bisnis-inkubasi serta pengembangan “*ancillary industries*” melalui keringanan perpajakan.

Kebijakan moneter diarahkan untuk mendukung pembiayaan modal investasi dan modal kerja melalui skema kredit khusus yang lebih fleksibel, pengembangan lembaga pembiayaan (*venture-capital*, *factoring* dan lain-lain) serta kebijaksanaan suku bunga yang lebih rendah dan jaminan perkreditan. Dalam kaitan tersebut perlu optimalisasi pemanfaatan dana 1-5% dari laba bersih BUMN bagi pengembangan industri kecil. Kebijakan sektor riil meliputi regulasi yang mendorong berkembangnya usaha industri kecil, pertanian, kelautan, perdagangan, ekspor, impor dan ketenagakerjaan.

Kebijakan administratif terutama diarahkan untuk penyederhanaan prosedur perijinan dan investasi, prosedur impor-ekspor, pengembangan patungan dengan industri besar dalam negeri maupun luar negeri, pelaksanaan UU Usaha Kecil, terutama dalam menata pola perdagangan dan pola pembayaran melalui pencadangan pasar. Paket-paket deregulasi diarahkan secara lebih adil bagi kepentingan kelompok industri kecil.

Simpulan

Salah satu upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal adalah dengan pemberdayaan kelompok agroindustri. Kelompok agroindustri ini dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip yang memiliki kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Pemberdayaan kelompok agroindustri sendiri tidaklah mudah, banyak permasalahan yang harus dihadapi, diantaranya: (1) kemampuan teknologi yang digunakan belum optimal; (2) kualitas sumberdaya manusia (SDM); (3) koordinasi dan sinkronisasi program kelembagaan; (4) penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Terkait hal ini pemerintah juga telah menerapkan kebijakan fiskal, moneter, administratif dan riil berikut yang ditujukan untuk memberikan pelayanan terhadap industri kecil. Jadi, apabila keempat indikator tersebut terpenuhi akan memacu pertumbuhan perekonomian lokal, sehingga lambat laun bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di desa. Secara tidak langsung hal itu akan menggairahkan lagi kegiatan masyarakat desa, sehingga mengurangi arus urbanisasi angka kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincoln. 1992. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi 2. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Djalaludin, Ahmad. 2012. *Perspektif Islam tentang Kepemilikan Negara atas Tambang di Indonesia*. Tidak dipublikasikan. Malang: Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Dominguez, P.G. and Adriono, L.S, 1994. *BIMP-EAGA Agroindustrial Cooperation: a proposed frame work and plant of action*. USM.

- Hubeis, Musa. 1997. Menuju Industri Kecil Profesional di Era Globalisasi Melalui Pemberdayaan Manajemen Industri. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Manajemen Industri IPB, Bogor.
- Kurniawaty. Strategi Pengembangan SDM Agroindustri. <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0702/05/01/htm>. Tanggal (14 Oktober 2002)
- Mangunwidjaja, D. dan Sailah, I. 2009. *Pengantar Teknologi Pertanian*. Bogor: Penebar Swadaya.
- Sioekartawi. 2000. *Pengantar Agroindustri*. Jakarta: PT, Raja Grafindo.
- Soewono, L. 2005. "Pemanfaatan Teknologi Pascapanen dalam Pengembangan Agroindustri". *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Inovatif Pascapanen untuk Pengembangan Industri Berbasis Pertanian*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian. Bogor.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.